



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN
2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. Bahwa indikator kinerja utama Pemerintah Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019;
- b. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Padang dan berdasarkan rekomendasi dari tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap indikator kinerja Pemerintah Kota Padang, maka perlu melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendyagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019.**

Pasal 1

Ketentuan Lampiran II Peraturan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 22) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

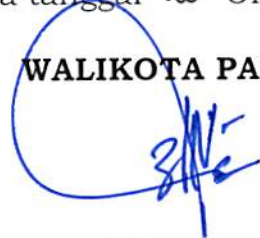
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 61

PDF Eraser Free

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan					SKPD Penanggung Jawab
			1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan	Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SD) Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SMP)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	SKPD Penanggung Jawab
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan	Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SD) Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SMP)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	SKPD Penanggung Jawab
2.	Berkembangnya usaha perdagangan dan industri	Perentase Penduduk SMP yang lulus UKG dengan nilai diatas 75 Perentase Penduduk SD yang lulus UKG dengan nilai diatas 75	Dinas Perdagangan dan Industri	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	SKPD Penanggung Jawab
2.	Berkembangnya usaha perdagangan dan industri	Perentase kontribusi sektor perdagangan dan industri	Dinas Perdagangan dan Industri	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	SKPD Penanggung Jawab

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD	Penanggung Jawab
1	1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan	Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SD) Peringkat prestasi se-Sumatera Barat (SMP)	Peringkat prestasi SD se – Sumatera Barat pada tahun n Peringkat prestasi SMP se – Sumatera Barat pada tahun n	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidikan SD yang lulus UKG dengan nilai diatas 75 Persentase Pendidikan SMP yang lulus UKG dengan nilai diatas 75	$\frac{\text{jumlah Pendidikan SD yang lulus UKG dengan nilai diatas 75}}{\text{jumlah Pendidikan SD yang mengikuti ujian}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah Pendidikan SMP yang lulus UKG dengan nilai diatas 75}}{\text{jumlah Pendidikan SMP yang mengikuti ujian}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Berkembangnya usaha perdagangan industri dan industri	Persentase sektor perdagangan dan industri Persentase kontribusi sektor perdagangan dan industri	Nilai sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB pada tahun n	Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Industri	Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Industri

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	5
1	2	3	4	5
3.	Berkembangnya Kota Padang sebagai kota tujuan wisata	Persentase PDRB pariwisata	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor pariwisata}}{\text{jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita (Rp. Juta)	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n}{\text{jumlah penduduk Kota Padang tahun } n} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Disnakerin, Dinas Pertanian, DPUPR dan DPRKPP
5.	Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	<i>Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas</i>	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya lapangan kerja dan usaha	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{jumlah pengangguran terbuka}}{\text{jumlah keseluruhan pengangguran}} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase pertumbuhan wirasaha baru	$\frac{\text{jumlah Pertambahan Wirasahawan baru}}{\text{jumlah keseluruhan Wirasahawan}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7.	Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat	Persentase pertumbuhan koperasi sehat	$\frac{\text{jumlah koperasi sehat}}{\text{jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	5
1	2	3	4	5
3.	Berkembangnya Kota Padang sebagai kota tujuan wisata	Persentase PDRB pariwisata	$\frac{\text{jumlah kontribusi sektor pariwisata}}{\text{jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pendapatan per kapita (Rp. Juta)	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n}{\text{jumlah penduduk Kota Padang tahun } n} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Disnakerin, Dinas Pertanian, DPUPR dan DPRKPP
5.	Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	<i>Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas</i>	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya lapangan kerja dan usaha	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{jumlah pengangguran terbuka}}{\text{jumlah keseluruhan pengangguran}} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Persentase pertumbuhan wirusaha baru	Persentase pertumbuhan wirusaha baru	$\frac{\text{jumlah Pertambahan Wirusahaawan baru}}{\text{jumlah keseluruhan Wirusahaawan}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7.	Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat	Persentase pertumbuhan koperasi sehat	$\frac{\text{jumlah koperasi sehat}}{\text{jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
8.	Berkurangnya penduduk miskin	Gini rasio	Alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk	Bappeda, Dinas Diskop UKM, Dinas Perdagangan, Disnakerin, Dinas Pertanian, DPUPR, DPRKPP, Dinas Pendidikan, dan DKK
8.	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah keseluruhan penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DKK, RSUD, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, DPRKPP, DP3AP2KB, DPUPR, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Disnakerin
9.	Terwujudnya tata kelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas	Persentase penyelesaian luas genangan	$\frac{\text{luas genangan terselesaikan pada tahun } n}{\text{jumlah luas genangan air pada tahun } n} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Gini rasio	Alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk	Bappeda, Dinas Diskop UKM, Dinas Perdagangan, Disnakerin, Dinas Pertanian, DPUPR, DPRKPP, Dinas Pendidikan, dan DKK
8.	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah keseluruhan penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DKK, RSUD, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, DPRKPP, DP3AP2KB, DPUPR, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Disnakerin
9.	Terwujudnya tata kelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas	Persentase penyelesaian luas genangan	$\frac{\text{luas genangan terselesaikan pada tahun } n}{\text{jumlah luas genangan air pada tahun } n} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	5	SKPD Penanggung Jawab
10.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan umum	<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan umum</i>	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
1.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - \text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1}{\text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
11.				Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<i>Nilai Indeks ketahanan daerah pada tahun n</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Kawasan kumuh perkotaan (ha)	Luas kawasan kumuh perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	5
10.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan umum	<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan umum</i>	Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	$\frac{\text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - \text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1}{\text{jumlah kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
11.	Terlaksananya penataan bangunan dan pembangunan kesesuaian Persentase kesesuaian bangunan dengan RTRW		$\frac{\text{jumlah bangunan yang sesuai dengan RTRW}}{\text{jumlah total bangunan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12.	Meningkatnya kesesiagaan Ketahanan Daerah		<i>Nilai Indeks ketahanan daerah pada tahun n</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		Kawasan kumuh perkotaan (ha)	Luas kawasan kumuh perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	SKPD	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Nilai LAKIP pada tahun n	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat dan BPKAD
15.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Seluruh Perangkat Daerah	

WALIKOTA PADANG,



MAHENDRA

PDF Eraser Free